

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pertanahan dan Hak-Hak Atas Tanah* (Cet.12; Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2011)
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Ahmad dan Pati, Sakka, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)
- Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996)
- A. Syarifudin, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Campbell, D. T., dan Stanley, J. C., *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research* (Houghton Mifflin, 1963)
- E. Babbie, *The Practice of Social Research* (Wadsworth Cengage Learning, 2010)
- Effendi Perangin, *Praktik Jual Beli Tanah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Heidelberg: C.F. Muller, 1999)
- Habib Adjie, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT Revika Aditama, 2008)
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Bidang Kenotariatan Buku Kesatu* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage Publications, 2014)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosuidio, cet.21 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998) Pasal 1870 juncto R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Intermedia, 1997)
- Liliana Tedjosaputro, *Tinjauan Malpraktek di Kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Sudut Hukum Pidana*
- M. Muhtarom, *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*.
- Mahfud MD, *Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

- Moh. Kusnardi, et.all., *Ilmu Negara* (edisi revisi), Cet. 4 (Jakarta: Gaya Media, 2000)
- Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), Buku XI, Bab VI.
- Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim* (Yogyakarta: Varia, 1991).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008).
- N. K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research* (Sage Publications, 2018).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993)
- R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Sage Publications, 2018).
- R. Soegondo, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991)
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1989)
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* Cetakan ke-21 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989).
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Intermasa, 1997)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008)
- Setiono, *Perlindungan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992)
- Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Victor M. Situmorang, et.all., *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi* (Jakarta: Rinika Cipta, 1993).
- Wahid, Muchtar, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah* (Jakarta: Republika, 2008).

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kode Etik PPAT

**Jurnal Hukum:**

Baharudin, "Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah" (Bandar Lampung:Universitas Bandar Lampung).  
Cecyllia Tamara B. Schouten  
Fred B.G. Tumbuan, "Beberapa Catatan mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Autentik" (Depok: Universitas Indonesia).  
I Wayan Kartika Jaya Utama, "Tanggung gugat Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Perbankan" (Surabaya: 2019).  
Mudofir Hadi, "Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim", *Varia Peradilan* 72 (September 1991).  
Muhammad Rizal, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 1 (Maret 2017).  
Yuni Aditya Adhani. "Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Kelalaian dalam Hal Pembuatan Akta Jual Beli yang Sertifikat Asli Hak Atas Tanahnya Tidak Diserahkan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 PK/PDT/2017)", *Jurnal Deli Sumatera*, (Universitas Sumatera Utara: 2022)

**Website:**

Firdaus Baderi, "E-PHTB: Perkuat Peran Notaris Amankan Penerimaan Negara" (<https://www.neraca.co.id/article/167413/e-phtb-perkuat-peran-notaris-amankan-penerimaan-negara>, diakses 3 Juni 2024).

Gramedia, "Pengertian Akta: Tujuan, Jenis-Jenis Akta, dan Fungsinya" (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akta/>, diakses 3 Juni 2024).

\_\_\_\_\_, "Teori Kepastian Hukum" (<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses 14 Mei 2024).

Ptun-Jakarta.go.id, "Negara Hukum dan Demokrasi" ([https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar\\_artikel/Negara%20Hukum%20Dan%20Demokrasi.pdf](https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Negara%20Hukum%20Dan%20Demokrasi.pdf), diakses 1 Mei 2024).

**Wawancara:**

Hasil wawancara dengan Herlina Tobing, S.H., Notaris-PPAT (Jakarta, 28 Januari 2024, Pukul 21.10 WIB).

Hasil wawancara dengan Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim Agung, Mahkamah Agung (Jakarta, 22 Mei 2024, Pukul 19.30 WIB).

**Putusan:**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 124/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 486/Pdt/2019/PTDKI

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 559 K/Pdt/2021.